



INDONESIA INDICATOR

LAPORAN MEDIA CETAK

**Pj. Gubernur Jawa Tengah
Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M
(15 Januari 2025)**

Summary

Media	News	Positive	Neutral	Negative
2	3	1	0	2

Daily Statistic

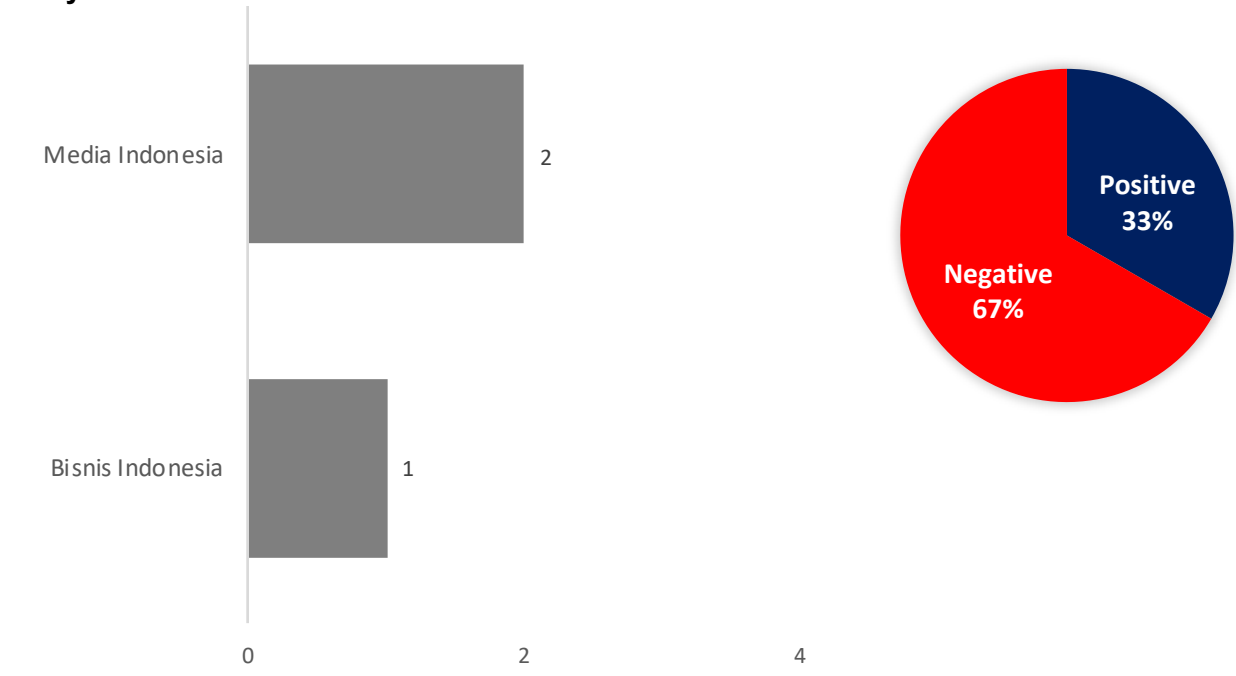


Table Of Contents : 15 Januari 2025

No	Date	Media	News Title	Page	Sentiment	Influencers
1	15 Januari 2025	Media Indonesia	Kantin Tergilas Makan Bergizi Gratis	2	Negative	
2	15 Januari 2025	Bisnis Indonesia	Praperadilan Hevearita Ditolak	8	Negative	
3	15 Januari 2025	Media Indonesia	Pengawasan Ternak Diperketat	7	Positive	Nana Sudjana

Title	Kantin Tergilas Makan Bergizi Gratis		
Media	Media Indonesia	Reporter	Faj/Far/Ant/X-10
Date	2025-01-15	Tone	Positive
Page	2	PR Value	
Summary	<p>Kantin di SMP Negeri 12 Kota Semarang, Jawa Tengah, kemarin siang tampak sepi. Padahal, saat itu sedang jam istirahat. Sesekali ada 1-2 siswa yang datang membeli minuman atau jajanan ringan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Rofiana, pedagang di kantin sekolah tersebut, mengatakan kantin mulai sepi seiring dengan bergulirnya program makan bergizi gratis (MBG) sejak sepekan lalu, Senin (6/1). Dampaknya sangat terasa karena omzet anjlok hingga 50% jika dibandingkan dengan sebelumnya. Menurut Rofiana, para siswa tidak lagi membelanjakan uang saku mereka untuk jajan di kantin seperti makan siang.- Bukan hanya di lingkungan SMPN 12, para pemilik kios makanan di sekitar SMPN juga mengeluhkan merosotnya omzet. Menurut pemilik usaha bidang makanan, Yohana, 50, pada awal rencana program MBG, sempat disebut pemenuhan logistik akan ditawarkan kepada UMKM Itu menumbuhkan harapan para pengusaha UMKM. Ternyata, kata Yohana, semua ditangani pemerintah.		

Kantin Tergilas Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional menyatakan kesiapan merangkul pedagang kantin sekolah dan UMKM agar bisa ikut terlibat.

AKHMAD SAFUAN
safuan@mediaindonesia.com

KANTIN di SMP Negeri 12 Kota Semarang, Jawa Tengah, kemarin siang, tampak sepi. Padahal, saat itu sedang jam istirahat. Sesekali ada 1-2 siswa yang datang membeli minuman atau jajanan ringan.

Rofiana, pedagang di kantin sekolah tersebut, mengatakan kantin mulai sepi seiring dengan bergulirnya program makan bergizi gratis (MBG) sejak sepekan lalu, Senin (6/1). Dampaknya sangat terasa karena omzet anjlok hingga 50% jika dibandingkan dengan sebelumnya.

Menurut Rofiana, para siswa tidak lagi membelanjakan uang saku mereka untuk jajan di kantin seperti makan siang. "Biasanya saya bawa nasi bungkus 35, tetapi sejak adanya program itu, sampai sore tidak ada yang laku terjual. Siswa umumnya hanya beli jenis minuman," ujar Rofiana.

Pemilik kios di sekitar sekolah, Ida, mengaku terpukul setelah berjalannya program MBG di sekolah. Nyaris tidak ada lagi siswa yang mampir ke kios untuk membeli makanan.

Bukan hanya di lingkungan SMPN 12, para pemilik kios makanan di sekitar SMPN 4 juga mengeluhkan merosotnya omzet. Menurut pemilik usaha bidang makanan, Yohana, 50, pada awal rencana program MBG, sempat disebut pemenuhan logistik akan ditawarkan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Itu menumbuhkan harapan para pengusaha UMKM.

Ternyata, kata Yohana, semua ditangani pemerintah. Pegiat usaha

Masalah dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

- Keadaan geografis yang menyulitkan akses ke layanan makanan bergizi.
- Masalah anggaran per porsi makan yang tidak mencukupi untuk daerah tertentu.
- Persiapan membangun dapur umum yang tidak mudah.
- Pentingnya akreditasi UMKM yang menyediakan makanan.
- Turunnya omzet pedagang di sekitar sekolah.
- Sisa makanan dari siswa yang tidak menghabiskan jatah mereka.
- Keluhan rasa dan harapan menu yang lebih bervariasi.
- Sistem reimburse untuk mitra dan tantangan biaya menu makanan.

Upaya Pemerintah

- Badan Gizi Nasional (BGN) berencana melibatkan pedagang kantin dan UMKM sebagai mitra.
- Kantin sekolah tetap bisa beroperasi meski program diterapkan, tetapi akan diberi waktu khusus pada jam istirahat kedua.
- Dinas Lingkungan Hidup di sejumlah wilayah telah bersedia menampung makanan sisa MBG.



seperti warung makanan, catering, dan lainnya tidak mendapat bagian. Berdasarkan pemantauan Media Indonesia, program MBG di ratusan sekolah mulai PAUD, SD, SMP, hingga SMA menyerap rata-rata 3.000 paket per dapur setiap harinya.

Keterpurukan juga dialami kantin

sekolah di Jakarta. Adanya keluhan itu diakui Penjabat (PJ) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi. "Terkait dengan kantin sekolah yang mungkin mengeluh karena mengalami penurunan pembelian, itu pastinya akan kami evaluasi," kata Teguh, Senin (13/1).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko menambahkan, persoalan tersebut akan dibawa saat evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala BGN Dadan Hindayana pun menyatakan kesiapannya merangkul pedagang kantin dan UMKM agar bisa ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis. Program MBG dikerjakan secara bertahap, termasuk penerapan mekanisme yang meringankan usaha pedagang kantin dan UMKM. "Kantin termasuk ke dalam kriteria mitra kami," kata Dadan.

Banyak usul

Bergulirnya MBG di sekolah-sekolah akan dilanjutkan dengan menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita mulai 20 Januari mendatang. Beragam usul untuk program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut mengemuka.

Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan dana zakat ikut digunakan membiayai program MBG untuk mengatasi keterbatasan anggaran negara. Selain itu, perlu dibuka partisipasi dari masyarakat.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga?" tutur Sultan.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai, bila sampai ada iuran dari masyarakat, program itu berubah. "Kalau iuran, namanya udah enggak makan gratis lagi dong," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Pihaknya lebih menyambut baik niat para kepala daerah yang menyiapkan anggaran untuk makan bergizi gratis. (Faj/Far/Ant/X-10)

Title	Praperadilan Hevearita Ditolak		
Media	Bisnis Indonesia	Reporter	Dany Saputra
Date	2025-01-15	Tone	Negative
Page	8	PR Value	
Summary	<p>Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita atas status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan praperadilan itu dibacakan oleh Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Jan Oktavianus pada Selasa, (14/1).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hakim juga menolak secara menyeluruh eksepsi atau nota keberata yang diajukan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu dalam sidang gugatan praperadilan. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Mba ita mengajukan gugatan praperadilan untuk mengetahui keabsahan sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan KPK. 		

| KASUS KORUPSI PEMKOT SEMARANG |

Praperadilan Hevearita Ditolak

Bisnis, JAKARTA — Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita atas status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan praperadilan itu dibacakan oleh Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Jan Oktavianus pada Selasa (14/1). “Menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya,” ucap Jan di ruang sidang

utama PN Jakarta Selatan.

Hakim juga menolak secara menyeluruh eksepsi atau nota keberatan yang diajukan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu dalam sidang gugatan praperadilan.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan,



Hevearita Gunaryanti Rahayu

Mbak Ita mengajukan gugatan praperadilan untuk mengetahui keabsahan sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan KPK.

Mbak Ita ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang terkait dengan pengadaan barang

dan jasa, gratifikasi, serta pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif penguatan pajak dan retribusi Semarang.



Selain Mbak Ita, KPK turut menetapkan tersangka lain yaitu Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah 2019—2024 Alwin Basri (suami Ita), Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Martono, dan pihak swasta Rahmat Jangkar. (Dany Saputra)

Title	Pengawasan Ternak Diperketat		
Media	Media Indonesia	Reporter	LD/AU/AT/FL/RK/JS/AS/SG/J-3
Date	2025-01-15	Tone	Positive
Page	7	PR Value	
Summary	<p>Di Jawa Tengah, jumlah kasus PMK tercatat menjangkit 3.968 ekor hewan ternak. Jumlah itu melonjak dari data sebelumnya sebanyak 2.660 ekor. Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menjaga lalu lintas hewan ternak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Jawa Tengah, dari jumlah ternak terpapar PMK tersebut, diketahui sebanyak 482 ekor ternak sudah sembuh, 89 ekor telah dipotong paksa, dan 154 ekor mati. Adapun terhadap sisanya, 3.243 ekor, masih dilakukan penanganan kuratif melalui pengobatan, terapi antibiotik, dan pemberian multivitamin. 		

Pengawasan Ternak Diperketat

Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah terkait untuk menjaga lalu lintas hewan ternak.

M TAUFAN SP BUSTAN
m.taufan@mediaindonesia.com

PARA peternak di Palu, Sulawesi Tengah, memperketat pengawasan sapi, kambing, dan domba mereka menyusul kembali merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) di Tanah Air.

Salah satu peternak, Basir Rauf, mengatakan, hingga saat ini belum ditemukan ternak yang terpapar PMK di Palu. Meskipun demikian, kebanyakan peternak sudah meningkatkan pengawasan untuk mengantisipasi hewan ternak mereka terjangkit virus tersebut.

"PMK penyakit hewan yang serius dan sangat menular. Makanya saya tidak mau ambil risiko," ungkapnya kepada *Media Indonesia* di Palu, kemarin.

Menurut Basir, agar hewan ternaknya tidak terjangkit PMK, kebersihan kandang dan imunitas sapi, kambing, hingga domba harus dijaga.

"Jadi setiap hari kandang harus dibersihkan. Termasuk vitamin untuk menjadi imunitas hewan ternak juga rutin diberikan," imbuhnya.

Sementara itu, di Jawa Tengah, jumlah kasus PMK tercatat menjangkiti 3.968 ekor hewan ternak. Jumlah itu melonjak dari data sebelumnya sebanyak 2.660 ekor.

Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menjaga lalu lintas hewan ternak.

Berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) Jawa Tengah, dari jumlah ternak terpapar PMK tersebut, diketahui sebanyak 482 ekor ternak sudah sembuh, 89 ekor telah dipotong paksa, dan 154 ekor mati. Adapun terhadap sisanya, 3.243 ekor, masih dilakukan penanganan kuratif melalui pengobatan, terapi antibiotik, dan pemberian multivitamin.

"Kami minta para kepala

daerah, kepala OPD terkait harus betul-betul menjaga perlintasan hewan ternak, baik perbatasan provinsi maupun antarkabupaten," kata Nana.

Transaksi menurun

Masih di Jawa Tengah, Tim Satuan Tugas (Satgas) PMK Dinas Pertanian, Peternakan, dan Ketahanan Pangan (Dintankan KP) Banjarnegara mencatat transaksi di Pasar Induk Hewan di Desa Tambakan, Banjarnegara, turun hingga 30% sejak merebaknya PMK. "Biasanya, pasar ini menerima sekitar 400-500 ternak per hari. Namun, saat ini jumlahnya hanya sekitar 300 ekor. Kami juga melakukan pemeriksaan secara ketat terhadap ternak yang masuk," ujar petugas dari Dintankan KP Banjarnegara Agung Yuwono, kemarin.

Menurutnya, penurunan jumlah ternak yang masuk ke pasar dipengaruhi oleh kekhawatiran peternak dari luar daerah. Banyak pedagang memilih untuk tidak membawa ternaknya ke pasar demi menghindari risiko penyebaran virus PMK.

"Kami memperketat pemeriksaan terhadap ternak yang datang, terutama yang berasal dari luar daerah. Jika hasil

pemeriksaan menunjukkan indikasi PMK, ternak tersebut langsung dipulangkan dan tidak diperbolehkan masuk untuk mencegah penularan ke ternak lain," kata dia.

Ada 17 sapi di Banjarnegara terindikasi terjangkit PMK. Temuan itu berdasarkan hasil pemeriksaan rutin yang dilakukan oleh tim satgas PMK Banjarnegara.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pasar Hewan Imogiri, Bantul, tutup untuk mencegah penularan PMK. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bantul Joko Waluyo menyampaikan kasus PMK di daerah itu tercatat menjangkiti 322 sapi, 32 ekor mati, dan 2 ekor dipotong paksa karena penyakit tersebut.

"Penutupan Pasar Hewan Imogiri dilakukan karena di Bantul ada PMK yang menyerang di beberapa titik," kata dia. Alasannya, pasar tersebut menjadi tempat lalu lintas hewan dari luar Bantul sehingga bisa memutus penyebaran virus PMK dari luar.

Dalam menanggapi tingginya kasus PMK di Bantul, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY Syam Arjayanti menambahkan, setelah berita PMK mencuat, aktivitas

di pasar hewan itu juga mengalami penurunan.

Vaksinasi PMK

Pemerintah Provinsi Riau dalam waktu dekat akan kembali melakukan vaksinasi PMK terhadap hewan ternak. Langkah itu dinilai penting untuk melindungi hewan ternak di wilayah Riau dari ancaman penyakit yang sangat menular tersebut. Ia menjelaskan, tahun ini Riau mendapat alokasi 53.600 dosis vaksin PMK.

Namun, untuk pelaksanaan vaksinasi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Riau masih menunggu giliran kiriman vaksin dari pemerintah pusat. "Kami masih menunggu kiriman vaksin dari pusat," kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas PKH Riau Faralinda Sari.

Di sisi lain, pemilik hewan ternak serta koperasi pengelola sapi perah di Jawa Timur diminta untuk melaksanakan vaksinasi PMK secara mandiri untuk mencegah penularan penyakit itu.

"Saya meminta seluruh koperasi untuk bisa melakukan vaksinasi mandiri," kata Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono di Surabaya, kemarin. (LD/AU/AT/FL/RK/JS/AS/SG/J-3)